



**MODEL PENINGKATAN KEMAMPUAN BERWIRAUSAHA PADA MASYARAKAT  
MISKIN MELALUI REVITALISASI KELOMPOK USAHA PENINGKATAN  
PENDAPATAN KELUARGA SEJAHTERA (UPPKS)  
DI PROVINSI BENGKULU**

**Sri Warsono, Trisna Murni**  
Fakultas Ekonomi Universitas Bengkulu

**ABSTRAK**

*Revitalisasi jika diyakini menjadi cara untuk meningkatkan UPPKS. Ini bisa dilakukan dengan: 1) meningkatkan proses produksi; 2) pengajaran dan pelatihan tentang teknik produksi, 3) meningkatkan manajemen bisnis dan keterampilan pemasaran. UPPKS harus dikelola secara profesional untuk dapat mencapai tujuan, untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan semua anggota dan pengelola.*

*Tujuan dari penelitian ini adalah delapan UPPKS yang tersebar di empat kabupaten di Provinsi Bengkulu. Data dikumpulkan melalui kuesioner, wawancara, observasi dan teknik dokumentasi. Data yang dikumpulkan kemudian ditabulasi dan dianalisis dengan menerapkan analisis deskriptif; setelah crosscheck dan dikurangi dengan hasil wawancara dan observasi.*

*Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen UPPKS secara umum adalah baik, tetapi bukan tidak efektif, namun mereka tidak mampu menangkap setiap peluang pasar secara optimal. Insentif pada program Bergulir modal, tidak seproduktif seperti yang diharapkan, manajemen tidak dapat beroperasi dengan benar; yang notabene menjadi beban bagi mereka. Pengetahuan yang terbatas dan keterampilan pemasaran anggota UPPKS telah menyebabkan keuntungan yang belum mencapai tingkat maksimum. Belum ada pusat untuk memasarkan produk, sinkronisasi dan koordinasi yang rendah anggota UPPKS dan stakeholder; peralatan produksi tidak baik / benar, keberadaan UPPKS belum mencapai posisi yang diharapkan*

**Kata Kunci :** *Revitalisasi, Manajemen, Optimalisasi*

**ABSTRACT**

*Revitalization if believed to be the way to improve UPPKS. It could be done by: 1) improving of the process of production; 2) teaching and training on the production technique; 3) improving management of the business and marketing skill. UPPKS has to be managed professionally to be able to reach the goals; to increase income and prosperity of all members and managements.*

*The object of this research is eight UPPKS that are spread out in four districts in Bengkulu Province. Data were collected through questionnaires, interviews, observations and documentation techniques. The collected data were then tabulated and analyzed by implementing the descriptive analysis; after being crosscheck and reduced with the results of interviews and observations.*

*Result of research showed that management UPPKS in general is a good, but it is not an ineffective. It has not able to each market opportunity optimally. Incentives on **modal bergulir** program, was not as productive as expected; management was not able operate them properly; that in fact to be a burden for them. Limited knowledge and marketing skill of UPPKS members have caused the profit has not reach the maximum level. There has no centre to market the product; low synchronization and coordination the UPPKS*

*members and stakeholders; production equipments were not good/proper, existence of the UPPKS has not reached the expected position*

**Key Word :** *Revitalization, Management, Optimalization*



## 1. PENDAHULUAN

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Bengkulu, telah melakukan kebijakan reformasi arah kebijakan program, serta menyelaraskan dengan arah kebijakan pemerintah. Program ketahanan dan pemberdayaan keluarga peserta KB tidak terlepas dari perhatian BKKBN. Dalam program ini melibatkan anggota peserta KB yang dikategorikan dalam keluarga pra sejahtera dan sejahtera 1 untuk terlibat menjadi anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS).

Kegiatan UPPKS dimulai pada tahun 1979, dengan nama Usaha Peningkatan Pendapatan Akseptor KB. Kegiatan diarahkan untuk meningkatkan peran serta ibu rumah tangga, agar dapat menyumbang peningkatan pendapatan keluarga. UPPKS terbukti dapat meningkatkan pendapatan akseptor KB, meningkatkan kemampuan dan keterampilan usaha ekonomi produktif, serta mampu menciptakan kepedulian sosial dalam membangun kemitraan (BKKBN, 1995), namun setelah berlakunya otonomi daerah aktivitas Kelompok UPPKS mengalami kemunduran.

Kelompok UPPKS adalah sebagai salah satu pemberdayaan ekonomi keluarga peserta KB. Pada th 2001 jumlah UPPKS di Provinsi Bengkulu 4.174 kelompok. Kemudian Yayasan Damandiri menghentikan dan menarik semua bantuan dana untuk UPPKS. Hal ini mengakibatkan terjadinya penurunan jumlah UPPKS dari 4174 (th 2001) menjadi 336 (th 2007) dan aktivitas UPPKS melemah (BKKBN Prov. Bengkulu, 2007: 9).

Penurunan jumlah dan melemahnya aktivitas UPPKS bukan semata-mata disebabkan oleh tidak adanya atau berkurangnya bantuan modal dari pemerintah, akan tetapi lebih disebabkan oleh keterbatasan kemampuan pengurus dan anggota dalam mengelola UPPKS. Hal tersebut ditunjukkan

oleh lemahnya kemampuan daya saing dari sisi produk dan pemasaran (pra survei, Maret 2008), sehingga mengakibatkan banyak UPPKS yang tidak bisa berkembang dan bahkan tidak bisa melanjutkan usahanya. Permasalahannya antara lain: kualitas produk tidak terjamin, penyajian /kemasan produk tidak menarik, peralatan sederhana/tidak lengkap, pengurus dan anggota kurang kreatif dan kurang inovatif, serta terbatasnya kemampuan pemasaran produk.

Revitalisasi usaha merupakan suatu cara untuk memperbaiki UPPKS, revitalisasi dapat dilakukan melalui 1) perbaikan proses produksi, 2) pendidikan dan pelatihan teknik pembuatan produk, 3) Manajemen usaha dan kewiraniagaan. UPPKS harus dikelola secara profesional, agar dapat tumbuh dan berkembang, sehingga tujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggota dan pengurus UPPKS dapat tercapai.

### Identifikasi Permasalahan

1. Pengurus dan anggota kurang kreatif dan inovatif.
2. Proses produksi masih sangat-sangat sederhana, dan sangat memerlukan bantuan dan pembinaan.
3. Kemampuan daya saing masih rendah (kualitas produk tidak terjamin, desain dan kemasan produk tidak menarik).
4. Pemasaran hasil produksi kurang lancar.

### Tujuan Penelitian

Obyek penelitian adalah kelompok UPPKS yang beranggotakan kelompok masyarakat yang tergolong pra sejahtera. Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui dan menganalisis keberadaan secara riil tentang kepengurusan dan aktivitas UPPKS
2. Mengetahui dan membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh kelompok UPPKS

3. Merancang model revitalisasi kelompok UPPKS dalam bentuk peningkatan kemampuan berwirausaha bagi pengurus dan anggota kelompok UPPKS.
4. Mengembangkan UPPKS

#### Manfaat Penelitian

Hasil Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat dan pengambil keputusan, sehingga dapat dipergunakan sebagai dasar untuk:

1. Merekomendasikan pengembangan UPPKS.
2. Merumuskan usaha pengembangan UPPKS.

3. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggota kelompok UPPKS

#### Urgensi Penelitian

1. Meningkatkan pendapatan keluarga miskin melalui UPPKS.
2. Mendukung program pemerintah dalam upaya menurunkan angka kemiskinan.
3. Memperkokoh keberadaan kelompok UPPKS.
4. Meningkatkan kemampuan berwirausaha pada pengurus dan anggota kelompok UPPKS

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### Kemiskinan.

Indikator kemiskinan adalah masyarakat yang tingkat konsumsinya ekuivalen beras per kapita untuk daerah pedesaan, apabila seseorang hanya mengkonsumsi ekuivalen beras kurang dari 320 kg per kapita per tahun, sedang di perkotaan ditentukan sebesar 480 kg (Sayogyo, dalam Erna Rositah, 2005). Ada tiga hal penyebab terjadinya kemiskinan (Kuncoro, 1997: 107):

- 1) Kemiskinan muncul karena ketidakseimbangan kepemilikan yang menimbulkan distribusi pendapatan timpang.
- 2) Kemiskinan muncul akibat perbedaan kualitas SDM.
- 3) Kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dan modal.

Pengurus dan anggota kelompok UPPKS adalah terdiri atas anggota keluarga peserta KB yang tergolong masyarakat pra sejahtera atau miskin (BKKBN Prov. Bengkulu, 2007)

### UPPKS

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat dan mempunyai peran penting dalam pembangunan nasional, oleh karena itu perlu dibina dan dikembangkan kualitasnya agar menjadi keluarga yang sejahtera. Aspek pembinaan dan pengembangan keluarga meliputi: aspek keagamaan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial dan budaya. Salah satu upaya untuk mewujudkan keluarga

sejahtera ditinjau dari aspek ekonomi adalah dengan cara membentuk kelompok UPPKS, ini merupakan instruksi Menteri Kependudukan/Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) no. 80/HK. 001/F3/95.

UPPKS adalah kelompok kegiatan dari para keluarga dalam wadah paguyuban keluarga sejahtera yang melakukan berbagai kegiatan usaha ekonomi produktif, sehingga dapat meningkatkan pendapatan keluarga. Anggota UPPKS terdiri dari keluarga pra sejahtera, keluarga sejahtera I, dan keluarga sejahtera II yang menjadi akseptor KB maupun yang belum ber KB dan anggota masyarakat lainnya (BKKBN, 2006). Pengertian tersebut menunjukkan bahwa pembentukan UPPKS merupakan upaya pemerintah untuk memberdayakan masyarakat, terutama masyarakat yang masih miskin, agar mereka mampu meningkatkan pendapatan menuju kesejahteraan melalui usaha peningkatan ekonomi produktif.

### Kewirausahaan

Suatu karier kewirausahaan dapat mendukung kesejahteraan masyarakat, dan menghasilkan imbalan financial yang nyata. Kewirausahaan menurut Raymond (dalam Rambat & Jero, 1998: 3) dapat diartikan sebagai suatu proses kreasi (penciptaan sesuatu yang baru) dan inovasi (membuat sesuatu yang berbeda dari yang sudah

ada). Proses kreatif dan inovatif hanya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki jiwa dan sikap kewirausahaan, yaitu orang-orang yang punya kepercayaan diri, berinisiatif, memiliki motif berprestasi, memiliki jiwa kepemimpinan, dan berani mengambil resiko dengan penuh perhitungan (Suryana, 2003: 6).

Sosok kewirausahaan yang ideal menuntut nilai-nilai kearah kualitas manusia. Untuk membina manusia menjadi makhluk yang berguna, tidak cukup hanya memberikan kecerdasan, ketrampilan atau kepiawian teknis saja. Prioritas mendasar adalah membangun sikap mental manusia. Struktur prioritas kewiraswastaan adalah 1) sikap mental, 2) Kepemimpinan/kepeloporan, 3) Ketatalaksanaan, 4) Keterampilan (Rusman, 1998: 8). Hasil pra survei (Maret, 2008) menemukan bahwa kondisi Kelompok UPPKS belum sepenuhnya memenuhi keempat faktor tersebut terutama pada faktor kepemimpinan dan ketatalaksanaan. Oleh karena itu diperlukan adanya pendidikan dan pelatihan bidang kewirausahaan, agar dapat mengelola usahanya dengan sukses dan dapat menciptakan kemandirian.

### **Bisnis Keluarga**

Bisnis keluarga adalah salah satu jalan berwirausaha. Bisnis keluarga adalah sebuah perusahaan yang anggota keluarganya secara langsung terlibat di dalam kepemilikan dan atau jabatan/fungsi. (Longenecker, 2001: 35). Terbentuknya Kelompok UPPKS adalah diawali dengan adanya suatu keinginan untuk membantu peningkatan ekonomi keluarga miskin melalui kegiatan bisnis keluarga yang kemudian berkembang menjadi kelompok UPPKS yang anggotanya terdiri dari beberapa keluarga peserta KB. Hasil yang dicapai dalam pembentukan kelompok UPPKS di Provinsi Bengkulu, sejak mulai dirintis kembali pada tahun 1985 sampai dengan 2001 telah terbentuk 4174 Kelompok UPPKS (BKKBN Prov Bengkulu, 2007:8)

Intrapreneur merupakan wirausaha yang ada dalam lingkungan perusahaan (Rambat & Jero, 1998 : 5). Intrapreneur dalam suatu perusahaan sangat diperlukan, karena sosok ini sangat relevan dengan tujuan perusahaan dalam upaya memenuhi

kebutuhan dan keinginan konsumen. Program kewirausahaan bagi perusahaan menjadi sangat penting, karena untuk mempertahankan semangat kreativitas dan inovasi dalam diri karyawan. Kelompok UPPKS akan mampu tumbuh dan berkembang jika para anggotanya memiliki jiwa kewirausahaan (Intrepreneurship).

Hasil pra survei (Maret, 2008) menemukan bahwa kondisi anggota belum memiliki semangat berkreasi dan berinovasi dalam menjalankan usahanya, hal ini ditunjukkan oleh aktivitas UPPKS yang cenderung stagnan dan belum ada tanda-tanda yang menunjukkan adanya pertumbuhan. Oleh karena itu perlu adanya upaya untuk membentuk jiwa kewirausahaan bagi para pengurus dan anggota melalui pelatihan kewirausahaan, bekerjasama dengan institusi kependidikan.

### **Manajemen Usaha**

Menurut Harimurti (1998: 1), unsur strategis yang perlu mendapatkan perhatian dalam pengelolaan usaha adalah perencanaan dan organisasi. Jika perencanaan dan organisasi dijalankan secara profesional, maka pengusaha akan mampu mengenal lebih dini tentang permasalahan yang akan dihadapi. Manajer/wirausaha yang profesional lebih sistimatis dan analitis dalam urusan pemecahan permasalahan manajemen, serta dalam menghadapi resiko bisnis. Key to business success is to develop a unique competitions advantage, one that creates value for customers and difficult for competition to duplicate (Scarborough, 2003: 48).

Resiko dalam berbisnis dipengaruhi oleh berbagai karakteristik khusus perusahaan. Karakteristik perusahaan yang nyata mempengaruhi resiko bisnis (Madura, 2001: 350) adalah:

- 1) pendanaan yang terbatas,
- 2) ketergantungan pada satu produk,
- 3) ketergantungan pada satu pelanggan,
- 4) ketergantungan pada satu pemasok, dan
- 5) ketergantungan pada karyawan kunci.

Ada kecenderungan bahwa UPPKS memiliki karakteristik tersebut, sehingga perlu segera melakukan perubahan untuk menghindari jatuhnya resiko yang lebih besar.

Pilihan jenis usaha dan komoditi, sangat menentukan keberhasilan dalam pengelolaan usaha. Tiga aspek yang perlu diperhatikan dalam pemilihan jenis usaha dan komoditi yang mempunyai nilai komersial, adalah: aspek operasi/produksi, keuangan dan pemasaran (Schrouder, 2000 : 41). Ringkasnya bahwa pemilihan jenis usaha dan komoditi yang akan diusahakan adalah jenis usaha dan komoditi yang bisa dioperasionalkan/diproduksi secara kontinyu, ada dana untuk kegiatan operasi dan pemasaran, serta ada pasar, dan mampu menguasai pasar. Kemudian ketiga aspek tersebut harus dikelola dengan baik. Contoh jenis usaha ini adalah unit simpan pinjam yang ada di UPPKS: dana dapat diperoleh dari anggota, dioperasikan/dipinjamkan kepada anggota, dan pasarnya adalah anggota atau masyarakat.

### **Kemitraan**

Kemitraan/kerjasama dapat diartikan sebagai pengaturan yang saling disepakati antara dua atau lebih public, organisasi swasta atau lembaga swadaya pemerintah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditentukan bersama, atau untuk merealisasikan kegiatan yang disepakati bersama, untuk keuntungan lingkungan dan masyarakat (Mitchell, 1997: 256). Kemitraan berlaku untuk banyak fungsi dan bermanfaat dalam perencanaan, kebijakan, pemantauan, evaluasi, pengumpulan data dan pengumpulan dana. Kemitraan dapat dikembangkan dengan kelompok klien, asosiasi sukarelawan, kelompok komunitas, LSM, institusi pendidikan, bisnis dan industri serta lembaga pemerintah. Kemitraan harus dilandasi dengan kepercayaan, artinya untuk mewujudkan saling percaya, kemitraan harus bersifat terbuka, akrab dan jujur.

---

### **3. METODE PENELITIAN**

#### **Lokasi Penelitian.**

Penelitian dilakukan di 4 daerah kabupaten/kota yang ada di Provinsi Bengkulu, yaitu Kab. Bengkulu Utara, Kab. Rejang Lebong, Kab. Kepahyang, dan Kota Bengkulu

#### **Rancangan Penelitian:**

1. Identifikasi kondisi UPPKS: Kepengurusan, modal, lokasi, peralatan yang digunakan dalam proses produksi, hasil produksi, penjualan, keuntungan, dan mitra kerja
2. Identifikasi permasalahan yang dihadapi anggota dan pengurus UPPKS
3. Identifikasi dukungan yang dapat memperkuat terciptanya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan anggota kelompok UPPKS

#### **Teknik Pengumpulan data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sbb:

1. Observasi : pengumpulan data melalui teknik pengamatan berupa pola interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat, ketika para pengurus

dan anggota kelompok UPPKS melakukan pengelolaan ekonomi produktif, dan interaksi antar anggota dan pengurus.

2. Wawancara mendalam: data dikumpulkan melalui wawancara dengan Ketua UPPKS mengenai kemudahan dan kesulitan dalam proses pengelolaan, bantuan dan kebijakan pemerintah.
3. Memberikan kuesioner kepada anggota UPPKS, dibantu oleh enumerator yang bertugas membacakan dan menjelaskan item-item. Kuesioner disusun berdasarkan indikator-indikator variabel dan parameter yang telah ditentukan.
4. Teknik dokumentasi, teknik ini digunakan untuk melengkapi perolehan data sekunder dan data primer (rekaman obyek tentang kejadian, tempat, individu, kelompok dll)

#### **Populasi, Sampel dan Pemilihan Informan**

Populasi Kelompok UPPKS 336 kelompok tersebar di 10 kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu. Jumlah

sampel ditentukan berdasarkan *purposive random sampling* dari 10 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Bengkulu dipilih 4 Kabupaten/Kota. Dari 4 Kabupaten/Kota setiap daerah dipilih dua kelompok UPPKS, sehingga jumlah obyek penelitian 8 kelompok UPPKS. Penentuan jumlah dan pemilihan Kelompok UPPKS tersebut, berdasarkan: 1) setiap daerah memiliki perbedaan secara khusus tentang karakteristik masyarakatnya dalam melakukan kegiatan ekonomi produktif dan dalam pengelolaan UPPKS, 2) . perlu penanganan secara khusus agar mempermudah dalam memperoleh informasi /data. Informan dipilih dari: 1) Pengurus dan anggota berdasarkan pertimbangan dari keaktifan individu dalam pelaksanaan kegiatan

kelompok UPPKS. 2) Tokoh formal/perangkat desa, petugas KB, institusi terkait dinas Perindag, dinas Koperasi dan UKM.

#### **Analisis data:**

Data yang diperoleh dari kuesioner diolah dengan menggunakan tabulasi, sedang analisis data menggunakan analisis deskriptif setelah melalui reduksi data dan kroscek data, dari hasil wawancara, pertimbangannya adalah perlu memahami gejala sosial berdasarkan kondisi nyata, kemudian dikaji dengan menghubungkan eksistensi kegiatan perekonomian masyarakat, pengetahuan, sikap, perilaku dari pengurus dan anggota kelompok UPPKS.

---

#### **4. HASIL PENELITIAN**

Pengembangan ekonomi produktif menjadi sasaran utama, dalam upaya meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan kepada para peserta akseptor KB yang tergolong miskin. Upaya yang dilakukan oleh BKKBN adalah melalui pemberdayaan ekonomi keluarga. Pembentukan kelompok UPPKS yang beranggotakan dari para akseptor KB merupakan dasar bertindak atau upaya yang dilakukan oleh BKKBN untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan kepada para peserta akseptor KB miskin. Setiap keluarga pra sejahtera dan sejahtera 1 sebagai anggota akseptor KB disarankan untuk menjadi anggota kelompok UPPKS dan memiliki usaha ekonomi produktif ( BKKBN Provinsi Bengkulu, 2009).

UPPKS cenderung dijalankan oleh para wanita, hal ini menunjukkan keberhasilan BKKBN dalam menghimbau ibu-ibu para akseptor KB pra sejahtera dan sejahtera 1 untuk bergabung membentuk UPPKS. Pengurus dan anggota UPPKS didominasi pada usia 30 sampai dengan 40 tahun yaitu sebesar 45% (hasil penelitian, 2009), pada usia ini dalam

suatu keluarga mulai membutuhkan dana yang cukup besar untuk kebutuhan sekolah anak-anaknya, sehingga terdorong untuk ikut terlibat dalam kelompok UPPKS, untuk memperoleh tambahan pendapatan. Tingkat pendidikan responden SLTP 45% dan SD 30 %, kondisi ini berpengaruh dan mempersulit kepada para anggota UPPKS dalam berkompetisi di dunia usaha, hal ini ditunjukkan oleh 35% responden berpendapatan kurang dari satu juta per bulan, dan 32,5 % berpendapatan kurang dari Rp 500.000,- sementara UMP th 2009: Rp 735.000,-

#### **Identifikasi UPPKS**

Jumlah anggota setiap UPPKS sangat bervariasi antara 10 sampai dengan 20 orang anggota akseptor KB, namun yang aktif sebagai anggota UPPKS yang mempunyai usaha kurang dari 10 orang. Oleh karena itu responden ditetapkan setiap UPPKS 5 anggota aktif yang mempunyai usaha. Berikut Hasil penyebaran kuesioner terhadap 40 anggota UPPKS aktif dari 8 UPPKS yang ada di 4 (empat ) daerah tingkat II kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu.

**Tabel 4.1.**  
 Nilai Rata-rata Persepsi Responden tentang Keberadaan UPPKS

No.	UPPKS	Nilai rata-rata							Keterangan
		Kepengurusan	Modal	Lokasi	Peralatan	Prod. Penj. Untung	Mitakerja/ Bantuan	Rerata UPPKS	
1	Bogenvil	2,43	2,4	2,4	1,6	2,05	2,5	2,23	C
2	Melati	2,37	2	1,8	2	2,32	2,1	2,09	C
3	Sekar Sari	2,4	2,3	3	1	2,32	2,8	2,3	C
4	Mawar Putih	2,63	2,2	2,2	1,2	2,37	2,6	2,2	C
5	Rafflesia	2,4	2,3	2	2,2	2,32	2,8	2,34	B
6	Bina Sejahtera	2,7	2,5	3	2,4	2,11	2,9	2,6	B
7	Serai Wangi	2,61	1,9	3	1,2	2,05	2,2	2,16	C
8	Flamboyan	2,27	1,9	2,8	1,6	2,05	2,6	2,2	C
Rerata		2,48	2,19	2,53	1,65	2,2	2,56	2,26	
Keterangan		B	C	B	K	C	B	C	

Sumber: hasil penelitian

**Keterangan:** B = baik; C = cukup baik ; K = kurang baik

Kategori nilai: 1 – 1,66 = Kurang

1,67 - 2,33 = Cukup

2,34 – 3 = Baik

Hasil survei menunjukkan bahwa menurut penilaian dari para anggota yang terpilih sebagai responden, kepengurusan dari 8 (delapan) kelompok UPPKS mempunyai nilai rerata 2,48, nilai ini termasuk dalam kategori baik. Aktivitas kepengurusan yang baik ini merupakan modal dasar untuk usaha pengembangan UPPKS. Lokasi usaha dan Mitra/ Bantuan masing-masing mempunyai nilai rerata 2,53 dan 2,56, nilai ini juga termasuk dalam kategori baik. Lokasi yang baik atau strategis dapat membantu memperlancar akses produksi dan akses penjualan, sehingga bisa menekan biaya produksi dan mempermudah konsumen menjangkau lokasi. Sementara Mitra/Bantuan yang baik dapat menunjang keberhasilan usaha.

Kemitraan yang telah dijalankan oleh Kelompok UPPKS adalah dengan: 1) Lembaga pemerintah terutama BKKBN sebagai pendiri, pembina dan pendukung terlaksananya aktivitas Kelompok UPPKS di Propinsi Bengkulu. 2) UNIB sebagai partner kerja dalam bidang pendidikan dan pelatihan kewirausahaan. 3) Dinas perdagangan, koperasi dan industri sebagai pembina usaha. Kemitraan tersebut telah membuahkan keberhasilan yang signifikan dengan nilai rerata 2,56 (Baik). hal ini menunjukkan

tingkat pelibatan anggota dan mitra kerja sudah efektif. Tingkat pelibatan masyarakat bukan hanya sekedar ditinjau dari sisi frekuensi kehadiran dalam sebuah pertemuan, tetapi kepercayaan, komunikasi, kesempatan dan fleksibilitas merupakan elemen yang penting yang menentukan efektif tidaknya partisipasi masyarakat (Mitchell, 1997: 259).

Nilai rerata Modal usaha adalah 2,19, sedang nilai rerata dari produksi, penjualan dan keuntungan adalah 2,2, kedua nilai tersebut termasuk dalam kategori cukup, ini merupakan suatu nilai yang menunjukkan bahwa keberadaan UPPKS masih perlu ditingkatkan. Modal merupakan faktor pendukung utama dalam berwirausaha, sehingga kepemilikan dan kuantitasnya perlu diperhitungkan. Produksi dan penjualan merupakan aktivitas sisi utama yang perlu diperhatikan dan dioperasikan dengan penuh perhitungan, agar menghasilkan produk yang berkualitas dan dapat menarik konsumen untuk membeli.

Melalui kegiatan produksi dan penjualan diharapkan dapat memperoleh keuntungan besar, sehingga dapat menjaga keberlangsungan hidup dan pengembangan usaha. Oleh karena itu keberadaan



modal, produksi, penjualan dan keuntungan yang ada pada setiap UPPKS perlu diperbaiki dan ditingkatkan untuk mencapai kondisi prima.

Peralatan produksi memiliki nilai rerata (1,65), nilai ini termasuk dalam kategori kurang baik. Para anggota UPPKS dalam melakukan proses produksi masih cenderung menggunakan alat-alat tradisional. Keberadaan peralatan inilah yang cenderung menyebabkan para anggota UPPKS tidak mampu bekerja secara optimal, hal ini yang menyebabkan kualitas dan kuantitas produk belum sesuai dengan yang diharapkan, sehingga hasil produksinya belum cukup mampu bersaing di pasar.

Keberadaan UPPKS secara rerata mempunyai nilai 2,26, ini merupakan nilai yang termasuk dalam kategori cukup. Sebuah nilai yang masih perlu ditingkatkan agar keberadaan UPPKS menjadi lebih baik. Perbaikan yang dapat dilakukan adalah dengan

melihat sisi kekurangan misalnya desain kemasan dan *image hygienic product* atau kendala-kendala lain yang terjadi pada setiap UPPKS.

Keberadaan UPPKS yang telah mencapai nilai baik adalah UPPKS Raflesia dan Bina Sejahtera. Nilai lokasi UPPKS Raflesia kurang mendukung bila dibandingkan dengan nilai-nilai lainnya yang ada dalam Tubuh UPPKS Raflesia, sehingga meskipun kondisinya baik, tetapi tidak mampu mengembangkan usahanya. Nilai produksi, penjualan dan keuntungan dari UPPKS Bina Sejahtera rendah, bila dibandingkan dengan nilai-nilai yang ada dalam tubuh UPPKSnya sendiri, hal ini yang menghalangi pengembangan usahanya, meskipun keberadaannya dalam kategori baik, tetapi kondisinya stagnan. Keberadaan UPPKS lainnya dalam kategori cukup, artinya UPPKS ini masih perlu peningkatan dan pengembangan usaha.

---

## 5. PEMBAHASAN

Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) merupakan kelompok usaha yang beranggotakan dari para ibu peserta akseptor Keluarga Berencana (KB) yang terdiri dari keluarga prasejahtera dan sejahtera I. Dibentuknya kelompok UPPKS ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian keluarga peserta akseptor KB melalui aktivitas berusaha. Dengan adanya aktivitas yang tergabung dalam kelompok UPPKS ini, diharapkan para ibu peserta akseptor KB mampu membantu meningkatkan pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Keberadaan para ibu peserta akseptor KB yang menjadi anggota kelompok UPPKS sebagian besar disibukkan oleh pekerjaan rumah tangga, sehingga jumlah anggota yang memiliki usaha dan yang aktif dalam aktivitas kelompok UPPKS relatif sedikit. Keadaan ini yang menyebabkan salah satu program BKKBN secara agregat belum mampu mengangkat harkat kehidupan dari keluarga para ibu peserta akseptor KB yang tergolong miskin. Oleh karena itu perlu adanya peninjauan dan penataan kembali serta adanya kebijakan dari BKKBN untuk berperan aktifkan anggota kelompok non aktif.

Program Kredit Keluarga Prasejahtera (KKP) yang dilakukan oleh BKKBN Provinsi mendapatkan respon positif dari anggota kelompok UPPKS, hal ini terbukti realisasi 510 Penerima Pinjaman Modal (PPM) melampaui target dari 508 PPM yang ditentukan, namun realisasi PPM yang melebihi target tersebut tidak dibarengi dengan peningkatan kemampuan dalam mengelola UPPKS. Hal ini dapat ditunjukkan bahwa dari 8 (delapan) UPPKS yang diteliti hanya ada 2 (dua) UPPKS yang keberadaannya dalam kategori baik.

Setiap anggota kelompok UPPKS masing-masing memiliki jenis usaha yang berbeda satu sama lain. Perbedaan tersebut memerlukan sentuhan sosial dan manajemen yang tangguh dari ketua UPPKS untuk mengakomodasi kebutuhan anggota kelompok. Aktivitas yang dimaksudkan adalah bagaimana ketua UPPKS mampu mengkoordinir, memotivasi dan mengarahkan anggota agar mereka dapat menjalankan kegiatan usahanya dengan berhasil, namun yang terjadi bahwa kondisi UPPKS secara umum belum menunjukkan adanya koordinasi dan kerjasama yang terukur antaranggota yang ada dalam tubuh UPPKS.

Kepengurusan UPPKS secara umum dinilai baik, tetapi cara kerjanya tidak efektif, sehingga belum mampu menangkap peluang pasar secara optimal. UPPKS juga memiliki kondisi yang prospektif, kondisi tersebut memberikan peluang bagi anggota kelompok UPPKS untuk mengembangkan usahanya, dan untuk ini diperlukan adanya dukungan dan kerjasama dengan pihak lain sebagai *partnership*. Mitra kerja dan bantuan pembinaan dari pihak-pihak yang terkait dalam pembinaan pengembangan usaha nilainya baik, meskipun dinilai baik oleh anggota kelompok, tetapi bentuk kerjasama dan bantuan yang diberikan tidak mengena pada sasaran, sehingga perkembangan UPPKS belum tampak menggembirakan.

Hasil identifikasi mengenai modal usaha dinilai cukup oleh anggota kelompok, sementara berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua UPPKS sebagian besar mengatakan bahwa pengembangan UPPKS diperlukan tambahan modal. Program pemberian bantuan pinjaman modal bergulir adalah dimaksudkan untuk meningkatkan perkembangan UPPKS, ternyata pemanfaatan tidak produktif seperti yang diharapkan. Hal ini disebabkan sebagian anggota kelompok UPPKS berpendapat bahwa dengan bantuan dana yang berupa modal usaha tersebut, tidak mampu memanfaatkan secara efektif dan efisien, sehingga menimbulkan beban.

Lokasi atau tempat usaha telah dirasakan baik oleh para anggota untuk melakukan aktivitas produksi dan pemasaran hasil produksi. Kedekatan bahan baku, sarana transportasi cukup memperlancar aktivitas operasi dan akses pasar, namun belum terwujudnya keinginan anggota kelompok untuk mendirikan pusat penampungan hasil produksi di bawah naungan UPPKS merupakan sebagian kendala yang belum teratasi dalam rangka mempromosikan hasil produksi.

Kelompok UPPKS pada dasarnya merupakan pemunculan usaha keluarga, agar dengan usahanya tersebut mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga. Pada perkembangan selanjutnya muncul berbagai kendala yang tidak mampu diatasi sendiri, terutama dari sisi modal dan pemasaran hasil produksi. Munculnya keinginan dari para anggota kelompok untuk memajukan

usahanya melalui: 1) terjalannya sebuah kerjasama, 2) keinginan berdirinya sebuah pusat penampungan atau pusat penjualan hasil produksi, hal tersebut menunjukkan bahwa ada kecenderungan menginginkan terbentuknya sebuah unit usaha yang bersifat kepemilikan bersama.

Produksi, pemasaran dan keuntungan yang diperoleh, nilai reratanya 2,2 nilai ini termasuk dalam kategori cukup baik. Produksi berkaitan dengan aktivitas atau proses menghasilkan suatu produk yang bermanfaat atau mempunyai nilai guna, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atau konsumen. Hasil produksi anggota kelompok UPPKS terutama produk-produk yang berupa makanan, secara umum mempunyai kualitas yang baik, tetapi terkendala oleh bentuk sajian dan kemasan yang kurang menarik.

Aktivitas pemasaran masih dimaknai sebagai kemampuan untuk melakukan penjualan produk, dan pemilihan tempat-tempat usaha untuk penitipan penjualan produk. Kebanyakan dari mereka belum mengenal arti pentingnya pengenalan produk kepada pasar, penetapan harga yang layak, dan daya tarik produk. Keterbatasan pengetahuan dan kemampuan pemasaran dari para anggota kelompok UPPKS ini, mengakibatkan keuntungan yang diperoleh belum mencapai maksimal.

Wirausaha adalah seorang produsen sekaligus seorang penjual, para anggota kelompok UPPKS merupakan wirausaha pemula yang selalu dihadapkan pada berbagai persoalan seperti modal, produksi dan pemasaran. Dalam perintisan usaha, modal teratasi dengan bantuan pinjaman dana bergulir meskipun jumlahnya masih tergolong minim, kegiatan produksi teratasi oleh kemauan dan kemampuan diri dalam menghasilkan suatu produk meskipun belum efektif dan efisien, pemasaran hasil produksi terbantu oleh keberadaan mitra kerja meskipun belum optimal. Program peningkatan kesejahteraan keluarga yang dimotori oleh BKKBN melalui adanya pembentukan kelompok-kelompok UPPKS, pada dasarnya telah menunjukkan adanya penambahan pendapatan keluarga.

Usaha-usaha yang dilakukan oleh anggota kelompok UPPKS, telah menghasilkan penam-

bahan pendapatan keluarga, tetapi peningkatannya belum signifikan. Kuantitas dan kualitas hasil produksi belum cukup mampu memenuhi permintaan konsumen, hal ini terkendala oleh keberadaan peralatan proses produksi. Peralatan proses produksi dinilai oleh anggota kelompok belum memadai dan masih bersifat tradisional.

Peralatan nilai reratanya 1,65 adalah suatu nilai yang dikategorikan kurang baik. Keberadaan UPPKS nilai reratanya 2,26, ini menunjukkan bahwa keberadaannya belum mencapai pada posisi yang baik, keadaan ini salah satu di antaranya disebabkan oleh **peralatan** produksi yang dimiliki kurang baik.



## 6. IMPLEMENTASI STRATEGIS.

Kebijakan revitalisasi dan pengembangan UPPKS yang efektif hendaknya dapat dilakukan dengan cara yang lebih luas dan terpadu, bukan hanya sekedar pengembangan anggota kelompok yang punya usaha secara individu, tetapi perlu adanya pembentukan usaha bersama yang dikelola oleh UPPKS sebagai organisasi. Pembentukan sentra penjualan hasil produksi anggota kelompok yang menjadi impian UPPKS, perlu ditindak lanjuti. Kerjasama BKKBN dengan Dinas Perindagkop perlu diintegrasikan dalam rangka melakukan revitalisasi dan pengembangan UPPKS.

Usaha-usaha yang dilakukan untuk pengembangan UPPKS, hanya akan bersifat semu atau hanya sekedar menunjukkan ada usaha yang tidak jelas keberadaannya, tanpa dibarengi dengan pengelolaan UPPKS secara terpadu. Asosiasi Kelompok UPPKS (AKU) merupakan suatu badan yang personalnya terdiri dari instansi terkait, berfungsi sebagai penggerak dan pengembangan kelompok UPPKS, keberadaannya perlu diperjelas dan difungsikan sebagaimana mestinya.

Program pemerintah melalui BKKBN dalam upaya melakukan revitalisasi dan pengembangan UPPKS dapat dilakukan melalui beberapa

kebijakan antara lain:

1. Kebijakan BKKBN untuk berperan aktifkan anggota kelompok yang tidak aktif.
2. Menciptakan koordinasi dan kerjasama yang terukur antar anggota yang ada dalam tubuh UPPKS.
3. Memberikan bantuan dana yang peruntukannya efektif.
4. Membentuk unit usaha yang bersifat kepemilikan bersama.
5. Memberikan bantuan **peralatan** produksi yang sesuai dengan kebutuhan.

Revitalisasi dan pengembangan Kelompok UPPKS yang dilakukan secara terpadu akan dapat menciptakan kemampuan daya saing, serta akses menuju penggunaan sumberdaya produktif akan lebih efektif dan efisien. Penyampaian informasi yang konsisten, komprehensif, terintegrasi dan *follow up* yang berkaitan dengan pengembangan usaha perlu ditingkatkan. Diperlukan adanya kajian lebih lanjut untuk mengatahui lebih jauh tentang fungsi dan peran BKKBN, instansi terkait dan Asosiasi Kelompok UPPKS (AKU) dalam upaya melakukan revitalisasi dan pengembangan usaha kelompok UPPKS.



## 7. SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan.

1. UPPKS merupakan kelompok usaha yang beranggotakan ibu-ibu peserta akseptor KB dari keluarga pra sejahtera dan sejahtera 1, yang keberadaannya adalah untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga.
2. Keberadaan UPPKS pada tahun 2007 mengalami penurunan baik secara kuantitas maupun kualitas, hal ini disebabkan karena dihentikannya bantuan dana dari Yayasan Damandiri, yang akibatnya kini dirasakan bahwa pertumbuhan UPPKS mengalami stagnan, sehingga diperlukan adanya revitalisasi agar dapat tumbuh dan berkembang.
3. Kelompok UPPKS terdiri atas beberapa keluarga yang mempunyai usaha yang bergerak dalam bidang industri rumah tangga, sebagian besar jenis usaha yang dilakukan adalah produksi makanan.
4. Anggota keluarga yang tergabung dalam kelompok UPPKS, bentuk kerjasamanya masih bersifat semu, aktivitas usahanya masih cenderung mengandalkan kekuatan dan kemampuannya sendiri yang masih sangat terbatas dalam mengelola usaha, sehingga tambahan penghasilannya juga masih sangat terbatas.
5. Kegiatan kelompok UPPKS secara individual mampu menambah pendapatan keluarga, tetapi peningkatannya belum signifikan, sehingga masih diperlukan adanya bantuan pembinaan usaha dari pemerintah atau swasta.
6. Munculnya keinginan dari para anggota kelompok untuk memajukan usahanya melalui usaha mewujudkan jalinan kerjasama, berdirinya sebuah pusat penampungan atau pusat penjualan

hasil produksi, dan terbentuknya sebuah unit usaha yang bersifat kepemilikan bersama.

7. Keterbatasan pengetahuan dan kemampuan pemasaran dari anggota kelompok UPPKS, karena mereka belum mengenal arti pentingnya pengenalan produk kepada pasar, penetapan harga yang layak, dan daya tarik produk. Hasil produksi masih terkendala oleh bentuk sajian dan kemasan yang kurang menarik.
8. Peralatan yang digunakan dalam proses produksi kurang baik, sehingga volume produksi terbatas dan kualitas produksi belum memiliki daya saing yang kuat.

### Saran

1. Untuk melakukan revitalisasi dan Pengembangan UPPKS diperlukan usaha:
  - Mengaktifkan anggota kelompok yang tidak aktif.
  - Mengkoordinir, memotivasi dan mengarahkan kegiatan usaha dari anggota yang ada dalam tubuh UPPKS.
  - Pemberian bantuan dana diperluas dan diperbesar, dengan peruntukan yang efektif.
  - Mendirikan pusat penampungan atau pusat penjualan hasil produksi anggota
  - Membentuk unit usaha yang bersifat kepemilikan bersama.
  - Memberikan bantuan **peralatan** produksi yang sesuai dengan kebutuhan.
2. Perlu mengkaji ulang tentang fungsi dan peran BKKBN, instansi terkait dan Asosiasi Kelompok UPPKS (AKU) dalam upaya melakukan revitalisasi dan pengembangan usaha kelompok UPPKS.
3. Pembinaan manajemen usaha bagi anggota Kelompok UPPKS masih sangat diperlukan.



**DAFTAR KEPUSTAKAAN**

- Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. 2006. *Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Melalui Kelompok UPPKS (Komitmen BKKBN Selama 3 Dekade)* Direktorat Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional.
- Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Provinsi Bengkulu. 2007. *Data Basis Kelompok UPPKS tahun 2007*. Bengkulu.
- BKKBN Propinsi Bengkulu, 2009
- Rositah, E. 2005, *Kemiskinan Masyarakat Desa Sekitar Hutan dan Penanggulangannya*, Governance Brief. Agustus, No 14
- Harimurti, S. 1998. *Manajemen Usaha Kecil*. Yogyakarta: BPFE,
- Kuncoro. 1977. *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan*. Yogyakarta : UPP AMD YKPN.
- Longenecker, JG. 2001. *Kewirausahaan*, Jakarta : Salemba Empat.
- Madura. 2001. *Pengantar Bisnis*. Jakarta : Salemba Empat.
- Mitchell. 1997. *Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Rambat dan Jero. 1998. *Kewirausahaan*. Jakarta : BPFE Universitas Indonesia.
- Hakim, R. 1998. *Kewirausahaan*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo, Scarborough, 2003, *Effective Small Business Management*, New jersey, Prentice Hall, Schroeder, 2000 *Operations Management*, USA, McGraw Hill,
- Suryana. 2003. *Kewirausahaan*. Jakarta : Salemba Empat.